



Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Kota Bandung

2018 - 2023



DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1 Strategi	36
5.2 Kebijakan	36
5.3 Analisis Strategi	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	12
Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf	12
Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	14
Tabel 5 TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	15
Tabel 6 TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung	35
Tabel 7 TC-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	38
Tabel 8 TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung	43
Tabel 9 TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung	10
Gambar 2 Kerangka Logis	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra-PD).

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Revisi Kota

Bandung Tahun 2018-2023 (Perda nomor tahun 2021). Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD Revisi yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Revisi tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota yaitu RPJMD Revisi Kota Bandung 2018-2023.

Renstra Revisi merupakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Bandung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan Kota Bandung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandung, yaitu 'Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis'.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025;

- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah menyusun dokumen arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan mengacu kepada RPJMD Revisi tahun 2018 – 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Revisi Kota Bandung Tahun 2018-2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
5. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018-2023 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Revisi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Revisi Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah Revisi dengan RPJMD Revisi, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi Perangkat Daerah) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, kemudian mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih oprasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MGD's atau indikator yang telah di ratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta fakto-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian tabel T-B.35

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 85 Ayat (2), Renstra Perangkat Daerah (PD) disusun sesuai tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD. Tujuan, strategi dan kebijakan dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan PD merupakan keadaan yang ingin diwujudkan PD pada akhir periode Renstra PD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD Revisi. Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung dari tahun 2018-2023 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung, dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya perhubungan sebagai suatu sistem.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

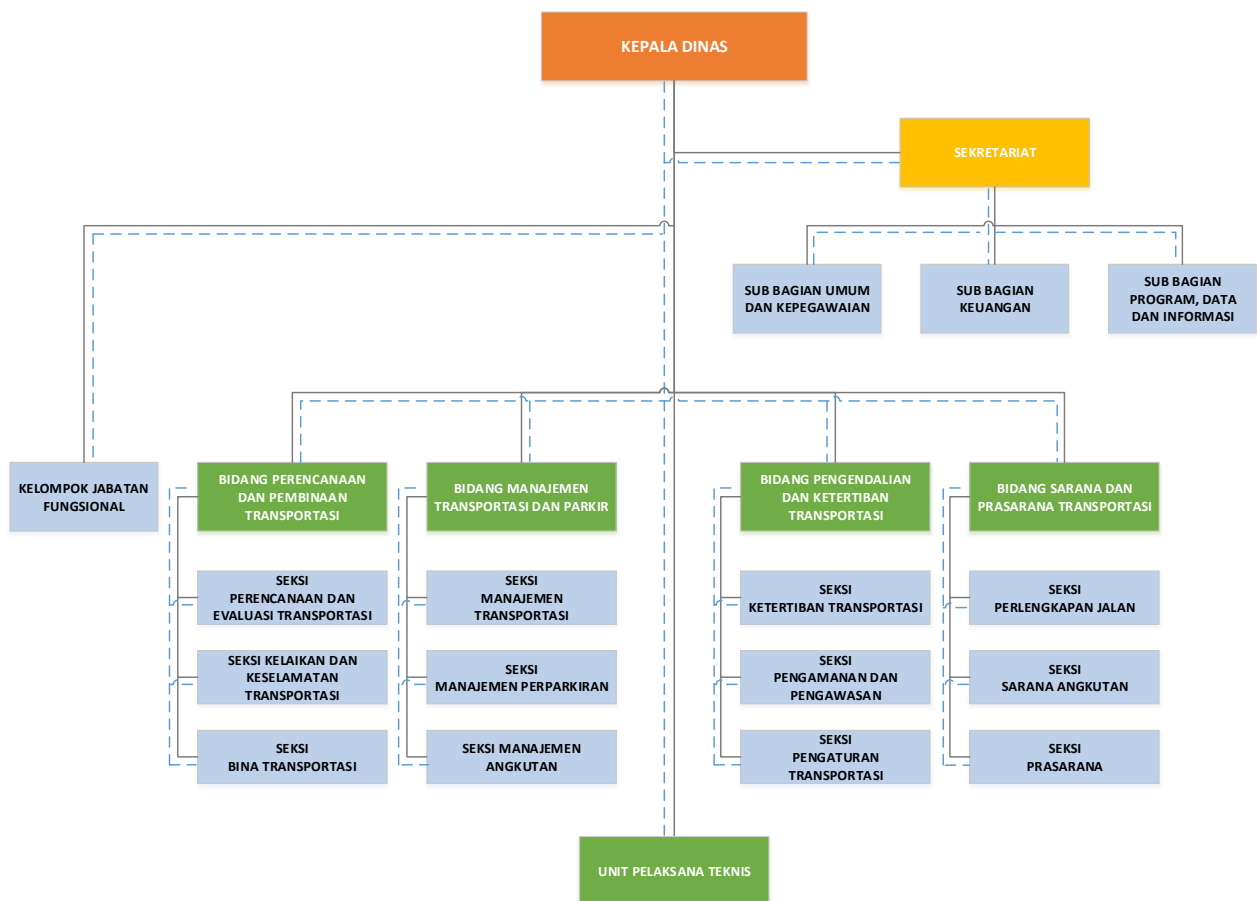
Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan lingkup Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari:

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung



Sumber: Peraturan Walikota Bandung No. 1392 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Data dan Informasi.
- c. Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi;
 2. Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi;
 3. Seksi Bina Transportasi.
- d. Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Transportasi;
 2. Seksi manajemen Perparkiran;
 3. Seksi Manajemen Angkutan.
- e. Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi, membawahkan:
 1. Seksi Ketertiban Transportasi;
 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 3. Seksi Pengaturan Transportasi.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahkan:
 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Sarana Angkutan;
 3. Seksi Prasarana.
- g. UPT;
- h. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset.

Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	-
2	Pasca Sarjana (S-2)	16
3	Sarjana (S-1)	102
4	Diploma (D-3)	3
5	Diploma (D-2)	4
6	Diploma (D-1)	1
7	SLTA	158
8	SLTP	18
9	SD	7
	Jumlah	309

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	11
2	III	144
3	II	145
4	I	9
	Jumlah	309

c. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Esselon III A (Sekretaris)	1
3	Esselon III B (Kepala Bidang)	4
4	Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka. UPT)	18
5	Esselon IV B (Kassubag TU UPT)	3
	Jumlah	27

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi Kota Bandung yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Revisi Kota Bandung Tahun 2018-2023 pada Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Revisi Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kota Bandung.

Selanjutnya pencapaian kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Kota Bandung disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD pada Peraturan Walikota Nomor 1392 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung, dibandingkan dengan target SPM. Pada akhirnya pencapaian kinerja 2013 s/d 2018 mencakup penetapan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta indikator SPM, maupun capaian kinerja sesuai target SPM, IKK dan target indikator lainnya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				70	72	74	76	78	82,02	91,85				1,172	1,276			
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani				5	5	5	5	5	5	5				1,000	1,000			
3	Rasio Pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi				4,00	3,94	3,88	3,82	3,76	3,97	4,48				1,01	0,90			
4	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia				20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	25,18	43,7				1,259	1,0925			
5	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan				20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	24,01	41,59				1,2005	1,03975			

Tabel TC-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan pelayanan Angkutan	20.878.235.160	17.014.775.104				17.870.406.972	16.002.518.813				0,856	0,941				-18,50%	-5,95%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7.581.225.944	5.913.345.069				6.753.492.053	5.490.157.782				0,891	0,928				-22,00%	-7,16%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	10.757.635.593	5.697.419.060				8.432.844.008	5.409.587.206				0,784	0,949				-47,04%	-5,05%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3.531.970.567	4.428.664.210				2.400.927.750	4.188.627.600				0,680	0,946				25,39%	-5,42%
Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	16.224.451.086	14.167.359.150				14.288.346.200	11.646.977.000				0,881	0,822				-12,68%	-
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	4.554.683.438	2.778.911.300				3.710.542.496	2.336.231.400				0,815	0,841				-38,99%	15,93%
Program Pembinaan Transportasi	796.720.000	686.301.800				645.392.900	410.645.600				0,810	0,598				-13,86%	-
Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	17.183.405.067	11.839.885.903				10.012.970.440	8.778.663.760				0,583	0,741				-31,10%	25,86%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan, Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun bagi stake holder lainnya.

Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek maupun becak. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini. Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan kereta api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel).

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak menengah (dalam kota). Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal (SAUM).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal-hal yang bersangkutan paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Barat Kota Bandung mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota Bandung.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi yaitu sekitar + 2,4 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang

mempengaruhi adalah daya tarik kota Bandung yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kota Bandung.

- 2) Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama menjelang hari libur (Jum'at, Sabtu, Minggu), adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha/bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang mendorong banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Jakarta yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja.
- 3) Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
- 5) Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
- 6) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Bandung seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran

yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism.

- 7) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 8) Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kota Bandung, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
- 9) Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
- 10) Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
- 11) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 12) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.

13) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (PERDA dan PERWAL) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Bandung senantiasa menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas

Perhubungan Kota Bandung sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Bandung di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah mengenai Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan yang berisi perencanaan, pembinaan, organisasi dan tata laksana di bidang transportasi.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara

kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.

- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Bandung serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Bandung kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.

- d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama tahun 2019-2021 teridentifikasi sebanyak 115 ruas jalan dengan status jalan beragam mulai dari kolektor primer, kolektor sekunder dan arteri sekunder dengan kondisi 28 ruas jalan berada di zona macet, data selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini

Level of Service	Titik	%
A	24	20,8696
B	26	22,6087
C	37	32,1739
D	20	17,3913
E	8	6,95652
TOTAL	115	100

Tingkat pelayanan jalan menunjukkan kondisi macet tidaknya suatu ruas jalan. Suatu ruas jalan dikategorikan macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat D, E ataupun F. Sedangkan sebaliknya suatu ruas jalan dikategorikan tidak macet apabila tingkat pelayanan jalannya berada di tingkat A, B atau paling rendah C.

Tingkat pelayanan jalan ditentukan oleh dua variabel / syarat penilaian yang terdiri dari v/c ratio (perbandingan antara volume dan kapasitas jalan) dengan batasan maks 0,8 dan kecepatan rata-rata tempuh dengan batasan minimal 21 km/jam.

Suatu ruas jalan yang dikategorikan macet mempunyai sejumlah aspek-aspek penyebab kemacetan (baik urusan perhubungan maupun urusan non perhubungan), apabila sejumlah aspek penyebab kemacetan dapat dihilangkan maka ruas jalan tersebut secara otomatis akan berangsur lancar / tidak macet.

Adapun aspek-aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan perhubungan terdiri dari :

1. Ngetem angkutan umum
2. Parkir on Street
3. Penyeberang jalan / Gerakan pejalan kaki
4. APILL (alat pemberi isyarat lalu lintas) persimpangan
5. Disiplin pengemudi angkutan umum
6. Marka / rambu belum ada / kurang
7. U turn (putaran) kendaraan

Sedangkan aspek-aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan non perhubungan terdiri dari :

1. Aksesibilitas gang / jalan
2. Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / Pendidikan
3. Pasar tumpah / PKL
4. Banjir / genangan
5. Kualitas / kondisi infrastruktur jalan
6. Perlintasan sebidang kereta api
7. Volume lalu lintas yang tinggi

Jumlah aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan perhubungan sebanyak 87 aspek dari 805 aspek yang teridentifikasi. Jumlah aspek penyebab kemacetan yang menjadi urusan non perhubungan sebanyak 117 aspek dari 920 aspek yang teridentifikasi

Yang menjadi dasar penentuan aspek penyebab kemacetan urusan perhubungan adalah hasil survey di lapangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah Kota Bandung yang diimplementasikan dalam Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis” ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang transportasi sesuai TUSI untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu “menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung yang terkait dengan visi Kota Bandung tersebut adalah ikut serta mewujudkan sistem transportasi Kota Bandung yang unggul dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait visi Kota Bandung tersebut yaitu “perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan juga penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang” diarahkan untuk terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung dan misi yang baik dari Kepala Daerah, adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan daya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan.
4. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan dari misi Kepala Daerah diatas, maka dituangkan kedalam Misi Kota Bandung yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan melayani dan mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.” Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah kota Bandung dengan konsep maju secara teknologi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan dan meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang

berkualitas. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar mobilitas penduduk kota, aksesibilitas sarana dan prasarana jalan, manajemen kebutuhan lalu-lintas dan keselamatan berlalu-lintas meningkat.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bandung diantaranya :

- Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
- Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
- Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
- Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun traffic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan di jalan.
- Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mewujudkan visi misi Kota Bandung yaitu :

- Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
- Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Trans Metro Bandung.
- Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Bandung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai sasaran prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat;
2. Meningkatnya kecukupan dan keandalan penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas dan kinerja layanan;
3. Pemenuhan kebutuhan jumlah, kesesuaian kompetensi, serta penyebaran SDM aparatur perhubungan darat agar mampu menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan dengan baik dan benar;
4. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat yang berkelanjutan;

5. Terwujudnya transportasi darat yang berkeadilan, yang menjangkau seluruh wilayah NKRI, terjangkau oleh semua golongan ekonomi dan sosial, terutama oleh kaum berkebutuhan khusus dan responsif gender;
6. Meningkatnya penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan di bidang transportasi darat;
7. Pengembangan transportasi darat yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
8. Meningkatnya ketersediaan regulasi di bidang Perhubungan Darat.

Adapun sasaran strategis/program Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas dan keterpaduan jaringan transportasi darat;
2. Meningkatnya keselamatan sektor transportasi darat;
3. Meningkatnya jumlah sarana transportasi darat yang memenuhi kriteria kinerja (SPM) yang ditetapkan;
4. Meningkatnya kualitas dan kinerja sdm di bidang perhubungan darat
5. Meningkatnya peran angkutan umum perkotaan;
6. Meningkatnya aplikasi skema manajemen transportasi perkotaan;
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan DITJEN Perhubungan Darat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Bandung). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun/dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi
2. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan
3. Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat
4. Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum
2. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum
3. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi

4. Meningkatnya ketersediaan perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi

Point yang menjadi keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan menghadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yang mana Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait di dalamnya, yaitu :

- a. Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer;
- b. Pemantapan hirarki jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer;
- c. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder;
- d. Pembangunan jalan tol;
- e. Pembangunan jalan layang;

- f. Pengembangan terminal terpadu dan terminal kota;
- g. Penerapan manajemen kebutuhan transportasi;
- h. Pengembangan angkutan umum;
- i. Pembangunan jalur sepeda dan fasilitas pendukungnya; dan
- j. Pembangunan jalan baru dan jalan tembus.

Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberapa point di atas diantaranya adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana APBD merupakan tupoksi instansi lain di luar Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun faktor pendorong yang bisa membantu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung diantaranya : adanya kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/BAPPENAS dalam penyediaan kajian studi pra FS untuk pembangunan Terminal Terpadu di Gede Bage; adanya payung hukum yang menjadi landasan untuk kebijakan pengenaan tarif berkenaan dengan pelayanan perhubungan di Kota Bandung.

Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali sosialisasi dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung maupun bengkel-bengkel tertunjuk dan instansi terkait lainnya.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mendukung rekomendasi dan isu strategis yang ada di dalamnya dilakukan melalui perwujudan Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim, dan Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan. Dinas Perhubungan melakukan program dan kegiatan yang dapat mendukung Rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu pada rekomendasi KLHS terkait uji kendaraan secara berkala, rekayasa lalu lintas, optimasi angkutan umum, peningkatan mutu angkutan kota, penambahan moda transportasi, sosialisasi berkala mengenai angkutan umum, peningkatan kendaraan umum perkotaan, dan peraturan perhubungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 3 (tiga) tahun ke depan yaitu :

- Penanganan kemacetan di 4 ruas jalan pada tahun 2021
- Penanganan kemacetan di 7 ruas jalan pada tahun 2022
- Penanganan kemacetan di 8 ruas jalan pada tahun 2023

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun namun karena Renstra yang disusun ini merupakan Renstra Revisi maka hasil akhir yang akan dicapai adalah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Jalan;
2. Meningkatnya Pelayanan publik yang prima;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Bandung

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas		Jumlah aspek penyebab kemacetan	11	10	9	8	7
		Meningkatnya Ketertiban Berjalan Lintas	Simpang tertib lalu lintas	20%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas	Rasio Pengguna kendaraan umum dan pengguna kendaraan pribadi	20:80	20,25:79,75	20,50:79,50	20,75:79,25	21:79
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia	20%	40%	60%	80%	100%
		Meningkatnya Mobilitas Penduduk Kota dan keselamatan angkutan	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan	20%	40%	60%	80%	100%
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	72	74	76	78

Tujuan dan sasaran semula (Sebelum Renstra Revisi)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas		Persentase Penurunan Kemacetan			20,87%	14,78%	7,83%
		Meningkatnya Pelayanan Jalan	Persentase tingkat pelayanan jalan			79,13%	85,22%	92,17%

2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Persentase unit kerja dengan nilai IKM "Baik"			88,89%	94,44%	100,00 %
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,00	83,50	85,00

Tujuan dan Sasaran setelah Revisi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk *unique* berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan. Adapun strategi yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Jalan; dengan indikator Persentase tingkat Pelayanan Jalan, sedangkan target nya di akhir tahun Renstra adalah sebesar 92,17%.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima; dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat; sedangkan target di akhir tahun Renstra adalah sebesar 85.

5.2 Kebijakan

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2015-2020 yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian

wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

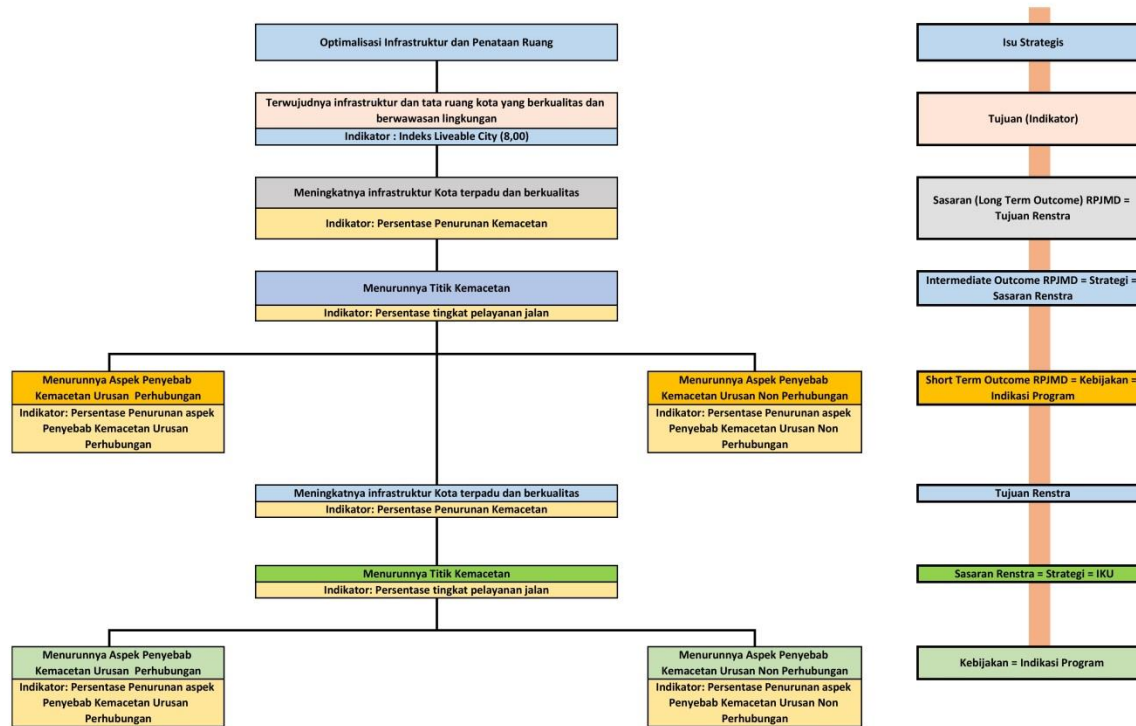
Mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”, Dinas Perhubungan Kota Bandung menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke-IV yaitu “Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan” melalui sasaran peningkatan infrastruktur kota terpadu dan berkualitas dengan strategi yang terinci pada tabel berikut:

Tabel TC-26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
MISI IV : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Jalan	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
			Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan
MISI II : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas

5.3 Analisis Strategi

Gambar 2 Kerangka Logis / Pohon Kinerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab PD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala PD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas PD berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan RENSTRA PD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Bandung, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus diatur dalam Pasal 99 ayat (2) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam

pencapaian sasarnya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel TC-27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran. Program (Out come) dan Kegiatan (Out put)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Persentase Penurunan Kemacetan	24,35%					20,87%		14,78%		7,83%		7,83%		DISHUB	
Persentase tingkat pelayanan jalan	75,65%					79,13%	93.613.271.610	85,22%		92,17%		92,17%			
Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	10,81%					9,57%	93.613.271.610	7,33%	165.474.598.771	3,85%	182.022.058.648	3,85%	441.109.929.029	SPT, MTP, PdKT dan PPT	
Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan	12,72%					11,20%		7,72%		4,24%		4,24%			

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	30 dokumen					30 buah	2.860.710.200	30 buah	3.146.781.220	30 buah	3.461.459.342	90 buah	9.468.950.762	Seksi Perencanaan dan evaluasi
Dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja	30 dokumen					30 buah	2.860.710.200	30 buah	3.146.781.220	30 buah	3.461.459.342	90 buah	9.468.950.762	Seksi Perencanaan dan evaluasi
Persentase perlengkapan jalan yang dibangun	42,74%					60%	42.429.085.383	80%	106.671.993.921	100%	117.339.193.313	100%	266.440.272.618	Bidang SPT dan MTP
Jumlah prasarana jalan yang terbangun	7 jenis					5 jenis	3.357.378.136	7 jenis	48.693.115.950	7 jenis	53.562.427.545	7 jenis	105.612.921.630	Seksi Sarana dan Seksi Prasarana
Jumlah perlengkapan jalan yang terbangun	8 jenis					6 jenis	23.618.485.575	8 jenis	40.980.334.133	8 jenis	45.078.367.546	8 jenis	109.677.187.253	Seksi Perlengkapan jalan
Prasarana jalan yang dipelihara	1 unit					1 unit	1.142.375.172	1 unit	1.256.612.689	1 unit	1.382.273.958	1 unit	3.781.261.819	Seksi Prasarana
Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara	137 titik					137 titik	14.310.846.500	137 titik	15.741.931.150	137 titik	17.316.124.265	137 titik	47.368.901.915	Seksi Manajemen Transportasi
Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola	12 lokasi					12 lokasi	4.383.921.751	12 lokasi	4.822.313.926	12 lokasi	5.304.545.319	12 lokasi	14.510.780.996	
Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan					12 bulan	1.910.368.431	12 bulan	2.101.405.274	12 bulan	2.311.545.802	12 bulan	6.323.319.507	
Jumlah terminal yang terpelihara	12 unit					12 unit	2.473.553.320	12 unit	2.720.908.652	12 unit	2.992.999.517	16 unit	8.187.461.489	

Persentase kendaraan umum yang lulus uji	90,25%		-	-	90.5%	6.017.231.584	90.75%	6.618.954.742	91%	7.280.850.217	91%	19.917.036.543	Bidang PPT	
Tersedianya sarana/prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set				1 set	572.988.994	1 set	630.287.893	1 set	693.316.683	3 set	1.896.593.570	Seksi KKT	
Uji petik kendaraan bermotor	6 kali				6 kali	86.648.905	6 kali	95.313.796	6 kali	104.845.175	18 kali	286.807.876	Seksi KKT	
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1 set	3.747.340.200	1 set	4.122.074.220	1 set	4.534.281.642	3 set	12.403.696.062	Seksi KKT	
Sosialisasi/Edukasi SOP dan Kebijakan Bidang Perhubungan					6 kali	894.632.483	6 kali	984.095.731	6 kali	1.082.505.304	18 kali	2.961.233.519	Seksi Bina Transprtasi	
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					2 set	715.621.002	2 set	787.183.102	2 set	865.901.412	6 set	2.368.705.517	Seksi KKT	
Laporan pelaksanaan pengaturan lalu lintas	12 laporan				12 laporan	11.136.923.000	12 laporan	13.750.615.300	12 laporan	15.125.676.830	36 laporan	40.013.215.130	Bidang PaKT dan Bidang MTP	
Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	N/A						4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Transpor tasi	

Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan					12 laporan	10.255.064.000	12 laporan	11.280.570.400	12 laporan	12.408.627.440	36 laporan	33.944.261.840	Seksi Pengaturan Transportasi
Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD/CFN	4 laporan					4 laporan	881.859.000	4 laporan	970.044.900	4 laporan	1.067.049.390	12 laporan	2.918.953.290	Seksi Pengamanan dan Pengawasan Transportasi
Laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untk jalan kota	N/A							4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Transportasi
Laporan Forum LLAJ kota	4 laporan							4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Angkutan
<i>Laporan persetujuan hasil Andalalin</i>	<i>n/a</i>							<i>4 laporan</i>	<i>500.000.000</i>	<i>4 laporan</i>	<i>550.000.000</i>	<i>8 laporan</i>	<i>1.050.000.000</i>	<i>Bidang MTP</i>
Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	<i>n/a</i>							4 laporan	250.000.000	4 laporan	275.000.000	8 laporan	525.000.000	Seksi Manajemen Transportasi
Laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	<i>n/a</i>							4 laporan	250.000.000	4 laporan	275.000.000	8 laporan	525.000.000	Seksi Manajemen Transportasi

<i>Laporan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya</i>	12 laporan					12 laporan	2.488.777.335	12 laporan	2.737.655.069	12 laporan	3.011.420.575	36 laporan	8.237.852.979	Bidang PdKT	
Jumlah kampanye publik	4 kali					4 kali	318.097.400	4 kali	349.907.140	4 kali	384.897.854	12 kali	1.052.902.394	Seksi Ketertiban Transpor tasi	
Jumlah laporan penertiban angkutan di jalan raya	12 laporan					12 laporan	2.170.679.935	12 laporan	2.387.747.929	12 laporan	2.626.522.721	36 laporan	7.184.950.585	Seksi Ketertiban Transpor tasi	
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	80,05					83	24.296.622.357	83	27.226.284.593	83	29.948.913.052	83	81.471.820.002	Ka UPT Angkuta n	
Tersedianya angkutan umum massal	9 koridor					9 Koridor	24.296.622.357	9 Koridor	26.726.284.593	9 Koridor	29.398.913.052	9 Koridor	80.421.820.002	Kasubag TU Angkuta n, Kasie Sarana Angkuta n	
Koordinasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru	3 event							3 event	500.000.000	3 event	550.000.000	3 event	1.050.000.000	Kasie Manaje men Angkuta n	

Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a							1 dokumen	2.000.000.000	1 dokumen	2.200.000.000	2 dokumen	4.200.000.000	PPT	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a							1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	2	4.200.000.000	PPT	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a							1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	2	4.200.000.000	Seksi Perencanaan	
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98					82	95.802.521.959	83,50	103.427.150.032	85	111.086.459.707	85	310.316.131.699	SEKRETA RIAT	
Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98					82	95.802.521.959	83,50	103.427.150.032	85	111.086.459.707	85	310.316.131.699	SEKRETA RIAT	
Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%					100%	95.802.521.959	100%	103.427.150.032	100%	111.086.459.707	100%	310.316.131.699	SEKRETA RIAT	
Dokumen Evaluasi Kinerja PD	5 dokumen						0	5 dokumen	600.000.000	5 dokumen	660.000.000	15 dokumen	1.260.000.000	SEKRETA RIAT	
Jumlah dokumen capaian kinerja	5 dokumen						0	5 dokumen	600.000.000	5 dokumen	660.000.000	15 dokumen	1.260.000.000	Subag Program	

Laporan Keuangan	12 laporan					12 laporan	51.112.482.449	12 laporan	53.668.106.571	12 laporan	56.351.511.900	36 laporan	161.132.100.920	Sekretariat	
Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 laporan					12 laporan	51.112.482.449	12 laporan	53.668.106.571	12 laporan	56.351.511.900	36 laporan	161.132.100.920	Subag Keuangan	
Cakupan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%					100%	936.692.200	100%	1.030.361.420	100%	1.133.397.562	100%	3.100.451.182	Sekretariat	
Tersedianya PDH berikut atributnya	322 stel					322 stel	440.572.000	322 stel	484.629.200	322 stel	533.092.120	966 stel	1.458.293.320	Subag Umpeg	
Terdidiknya ASN Dishub	2 orang					2 orang	496.120.200	2 orang	545.732.220	2 orang	600.305.442	6 orang	1.642.157.862	Subag Umpeg	
Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%					100%	2.727.193.230	100%	2.999.912.553	100%	3.299.903.808	100%	9.027.009.591	Sekretaris	
Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	2 set					2 set	185.038.970	2 set	203.542.867	2 set	223.897.154	6 set	612.478.991	Subag Umpeg	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 set					10 set	839.988.470	10 set	923.987.317	10 set	1.016.386.049	30 set	2.780.361.836	Subag Umpeg	
Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	12 laporan					12 laporan	729.562.150	12 laporan	802.518.365	12 laporan	882.770.202	36 laporan	2.414.850.717	Subag Umpeg	
Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 laporan					12 laporan	443.838.040	12 laporan	488.221.844	12 laporan	537.044.028	36 laporan	1.469.103.912	Subag Umpeg	
Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	12 laporan					12 laporan	123.096.000	12 laporan	135.405.600	12 laporan	148.946.160	36 laporan	407.447.760	Subag Umpeg	

Jumlah laporan penyelenggaraan perjalanan dinas	12 laporan					12 laporan	405.669.600	12 laporan	446.236.560	12 laporan	490.860.216	36 laporan	1.342.766.376	Subag Umpeg
<i>Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%					100%	110.786.000	100%	121.864.600	100%	134.051.060	100%	366.701.660	Sekretaris
Tersedianya kendaraan dinas / operasional	2 unit					2 unit	34.248.000	2 unit	37.672.800	2 unit	41.440.080	6 unit	113.360.880	Subag Umpeg
Tersedianya mebel	2 set					2 set	76.538.000	2 set	84.191.800	2 set	92.610.980	6 set	253.340.780	Subag Umpeg
<i>Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%					100%	4.558.023.700	100%	5.013.826.070	100%	5.515.208.677	100%	15.087.058.447	Sekretaris
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan					12 laporan	118.946.400	12 laporan	130.841.040	12 laporan	143.925.144	36 laporan	393.712.584	Subag Umpeg
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan					12 laporan	2.223.204.300	12 laporan	2.445.524.730	12 laporan	2.690.077.203	36 laporan	7.358.806.233	Subag Umpeg
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan					12 laporan	2.215.873.000	12 laporan	2.437.460.300	12 laporan	2.681.206.330	36 laporan	7.334.539.630	Subag Umpeg
<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100%					100%	5.282.797.260	100%	5.811.076.986	100%	6.392.184.685	100%	17.486.058.931	Sekretaris

Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	4 laporan					4 laporan	3.915.355.720	4 laporan	4.306.891.292	4 laporan	4.737.580.421	12 laporan	12.959.827.433	Subag Umpeg
Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit					3 unit	1.063.363.540	3 unit	1.169.699.894	3 unit	1.286.669.883	3 unit	3.519.733.317	Subag Umpeg
Jumlah laporan pemeliharaan sarpras kantor	4 laporan					4 laporan	304.078.000	4 laporan	334.485.800	4 laporan	367.934.380	12 laporan	1.006.498.180	Subag Umpeg
<i>IKM</i>	73,71					82	31.074.547.120	83,5	34.182.001.832	85	37.600.202.015	85	102.856.750.967	BLUD
IKM	80,05					82	24.738.480.000	83,5	27.212.328.000	85	29.933.560.800	85	81.884.368.800	BLUD angkutan
IKM	67,38					82	6.336.067.120	83,5	6.969.673.832	85	7.666.641.215	85	20.972.382.167	BLUD Parkir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring perubahan RPJMD maka Renstra Dinas Perhubungan pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

Berdasarkan matriks 3 (tiga) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab VI, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mendukung sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.

Tabel TC-28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tingkat pelayanan jalan	75,65%			79,13%	85,22%	92,17%	92,17%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98			82,00	83,50	85,00	85

Penjabaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung dari mulai penetapan isu strategis sampai program kegiatan yang akan dilaksanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ISU STRATEGIS

Optimalisasi Infrastruktur dan Penataan Ruang khususnya masalah penanganan kemacetan

- TUJUAN

1. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Indikator : Persentase Penurunan Kemacetan

2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator : Persentase unit kerja dengan nilai IKM "Baik"

- Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Jalan

Indikator : Persentase tingkat pelayanan jalan

2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

- Strategi

1. Meningkatnya Pelayanan Jalan

Indikator : Persentase tingkat pelayanan jalan

2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

- Kebijakan

1. Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan

Indikator : Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan

2. Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan non Perhubungan

Indikator : Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan

3. Terwujudnya Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas

Indikator : Persentase Indeks Pelayanan Publik unit kerja Kategori Baik

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) = IKI KEPALA DINAS

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat pelayanan jalan			79,13	85,22	92,17
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	83,5	85

PERJANJIAN KINERJA

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat pelayanan jalan			79,13	85,22	92,17
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			82	83,5	85
3	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti			100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA INDIIDU (IKI) ESSELON 3 DAN 4

- 1 BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI (PPT)**

Esselon 3

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan			9,57	7,33	3,85
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan non Perhubungan			11,2	7,72	4,24
3	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evauasi			23	23	23
4	Persentase kendaran umum yang lulus uji			90,50	90,75	91
5	Indeks Pelayanan Publik lingkup Perencanaan dan Pembinaan Transportasi			82	83,5	84

Esselon 4 Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Tersedianya sarana/prasarana pengujian kendaraan bermotor			1	1	1
2	Uji petik kendaraan bermotor			6	6	6
3	Tesedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1	1	1
4	Sosialisasi/Edukasi SOP dan Kebijakan Bidang Perhubungan			6	6	6
5	Indeks Pelayanan Publik lingkup kelaikan dan keselamatan transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Dokumen Perencanaan dan			23	23	23

	pengukuran kinerja					
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup perencanaan dan evaluasi transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Bina Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Sosialisasi/Edukasi SOP dan Kebijakan Bidang Perhubungan			6	6	6
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup pembinaan transportasi			82	83,5	85

2 BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN PARKIR

Esselon 3

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan			9,57	7,33	3,85
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan non Perhubungan			11,2	7,72	4,24
3	Persentase perlengkapan jalan yang dibangun			60	80	100
4	Laporan pelaksanaan pengaturan lalu lintas			12	12	12
5	Laporan persetujuan hasil Andalalin			4	4	4
6	Indeks Pelayanan Publik lingkup Manajemen transportasi dan parkir			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Manajemen angkutan

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Laporan Forum LLAJ kota			4	4	4
2	Koordinasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru			3	3	3
3	Indeks Pelayanan Publik lingkup Manajemen angkutan			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Manajemen Parkir

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Jumlah perlengkapan jalan yang terbangun			1	1	1
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup Manajemen angkutan			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Manajemen Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Laporan penanganan kemacetan akibat APILL di simpang pajajaran			4	4	4
2	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara			137	137	137
3	Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas			4	4	4
4	Laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untk jalan kota			4	4	4
5	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin			4	4	4
6	Laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin			4	4	4
7	Indeks Pelayanan Publik lingkup Manajemen Transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 UPT Terminal

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik lingkup Terminal Type C			82	83,5	85
2	Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola			12	12	12

Esselon 4 UPT Angkutan

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik lingkup Angkutan TMB			82	83,5	85
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup Angkutan bus sekolah			82	83,5	85
3	Indeks Pelayanan Publik lingkup Angkutan bus bandros			82	83,5	85
4	Indeks Pelayanan Publik lingkup Bike sharing			82	83,5	85

Esselon 4 UPT Parkir

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pelayanan Publik lingkup parkir on street mesin parkir			82	83,5	85
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup parkir on street manual			82	83,5	85

3 BIDANG PENGENDALIAN DAN KETERTIBAN TRANSPORTASI (PDKT)

Esselon 3

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan			9,57	7,33	3,85
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan			11,2	7,72	4,24
3	Laporan pelaksanaan pengaturan lalu lintas			4	4	4
4	Laporan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya			4	4	4
5	Indeks Pelayanan Publik lingkup pengendalian dan ketertiban transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Pengamanan dan pengawasan

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Laporan penertiban angkum yang ngetem			12	12	12
2	Laporan penertiban PKL penyebab kemacetan			12	12	12
3	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD/CFN			4	4	4
4	Indeks Pelayanan Publik lingkup pengamanan dan pengawasan			82	83,5	85

4 Esselon 4 Seksi Ketertiban Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Laporan penertiban pengendara			12	12	12

	yang parkir sembarangan					
2	Laporan pengaturan aksesibilitas gang / jalan			12	12	12
3	Jumlah kampanye publik			4	4	4
4	Indeks Pelayanan Publik lingkup ketertiban transportasi			82	83,5	85

5 Esselon 4 Seksi Pengaturan Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Laporan penertiban angkutan umum			12	12	12
2	Laporan pengaturan aksesibilitas gang			12	12	12
3	Laporan pengaturan lalu lintas			12	12	12
4	Indeks Pelayanan Publik lingkup pengaturan transportasi			82	83,5	85

BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (SPT)

Esselon 3

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan			9,57	7,33	3,85
2	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan			11,2	7,72	4,24
3	Persentase perlengkapan jalan yang dibangun			60	80	100
4	Indeks Pelayanan Publik lingkup Sarana Prasarana Transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Perlengkapan jalan

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Pemasangan perlengkapan jalan			6	6	6
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup perlengkapan jalan			82	83,5	85

6 Esselon 4 Seksi Sarana Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Jumlah prasarana jalan yang terbangun			1	1	1
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup sarana transportasi			82	83,5	85

Esselon 4 Seksi Pra sarana Transportasi

No	Indikator Kinerja	Target tahun ke				
		1	2	3	4	5
1	Jumlah prasarana jalan yang terbangun			1	1	1
2	Indeks Pelayanan Publik lingkup sarana transportasi			82	83,5	85

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dokumen Rencana Strategis Revisi ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2018 s/d 2023 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sampai tahun 2023.
3. Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 s/d 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 s/d 2023 khususnya sektor perhubungan.

4. Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Revisi dengan Rencana Kerja unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Revisi Dinas Perhubungan Kota Bandung 2019-2023, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bandung berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung (Renja) Tahun 2019 s/d 2023.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Bandung

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan pelayanan Angkutan	20.878.235.160	17.014.775.104				17.870.406.972	16.002.518.813				0,856	0,941				-18,50%	-5,95%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7.581.225.944	5.913.345.069				6.753.492.053	5.490.157.782				0,891	0,928				-22,00%	-7,16%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	10.757.635.593	5.697.419.060				8.432.844.008	5.409.587.206				0,784	0,949				-47,04%	-5,05%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	3.531.970.567	4.428.664.210				2.400.927.750	4.188.627.600				0,680	0,946				25,39%	-5,42%
Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	16.224.451.086	14.167.359.150				14.288.346.200	11.646.977.000				0,881	0,822				-12,68%	-17,79%
Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	4.554.683.438	2.778.911.300				3.710.542.496	2.336.231.400				0,815	0,841				-38,99%	-15,93%
Program Pembinaan Transportasi	796.720.000	686.301.800				645.392.900	410.645.600				0,810	0,598				-13,86%	-40,17%
Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	17.183.405.067	11.839.885.903				10.012.970.440	8.778.663.760				0,583	0,741				-31,10%	-25,86%

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas		Persentase Penurunan Kemacetan			20,87%	14,78%	7,83%
		Meningkatnya pelayanan jalan	Persentase tingkat pelayanan jalan			79,13%	85,22%	92,17%
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat			82,00	83,50	85,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,00	83,50	85,00

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
MISI IV : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur serta pengendalian ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Meningkatnya pelayanan jalan	Meningkatnya pelayanan jalan	Menurunnya Aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan
			Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Out come) dan Kegiatan (Out. put)	Data Capaian per tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas				Persentase Penurunan Kemacetan	24,35%					20,87%			14,78%		7,83%		7,83%		DISHUB	
	Meningkatnya pelayanan jalan			Persentase tingkat pelayanan jalan	75,65%					79,13%	93.613.271.610		85,22%		92,17%		92,17%			
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Perhubungan	10,81%					9,57%			7,33%		3,85%		3,85%		SPT, MTP, PdKT dan PPT	
				Persentase Penurunan aspek Penyebab Kemacetan Urusan Non Perhubungan	12,72%					11,20%	93.613.271.610		7,72%		4,24%		4,24%	441.109.929.029		
		2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	30 dokumen					30 buah	2.860.710.200		30 buah	3.146.781.220	30 buah	3.461.459.342	90 buah	9.468.950.762	Seksi Perencanaan dan evaluasi	
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan dan pengukuran kinerja	30 dokumen					30 buah	2.860.710.200		30 buah	3.146.781.220	30 buah	3.461.459.342	90 buah	9.468.950.762	Seksi Perencanaan dan evaluasi	
		2.15.02.2.02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Persentase perlengkapan jalan yang dibangun	42,74%					60%	42.429.085.383		80%	106.671.993.921	100%	117.339.193.313	100%	266.440.272.618	Bidang SPT dan MTP	
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	7 jenis					5 jenis	3.357.378.136		7 jenis	48.693.115.950	7 jenis	53.562.427.545	7 jenis	105.612.921.630	Seksi Sarana dan Seksi Prasarana	
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang terbangun	8 jenis					6 jenis	23.618.485.575		8 jenis	40.980.334.133	8 jenis	45.078.367.546	8 jenis	109.677.187.253	Seksi Perlengkapan jalan	
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Prasarana jalan yang di pelihara	1 unit					1 unit	1.142.375.172		1 unit	1.256.612.689	1 unit	1.382.273.958	1 unit	3.781.261.819	Seksi Prasarana	
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekanaan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dielihara	137 titik					137 titik	14.310.846.500		137 titik	15.741.931.150	137 titik	17.316.124.265	137 titik	47.368.901.915	Seksi Manajemen Transportasi	
		2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal penumpang tipe C yang dikelola	12 lokasi					12 lokasi	4.383.921.751		12 lokasi	4.822.313.926	12 lokasi	5.304.545.319	12 lokasi	14.510.780.996		
		2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Tersedianya jasa kebersihan terminal	12 bulan					12 bulan	1.910.368.431		12 bulan	2.101.405.274	12 bulan	2.311.545.802	12 bulan	6.323.319.507		
		2.15.02.2.03.04	Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang terpelihara	12 unit					12 unit	2.473.553.320		12 unit	2.720.908.652	12 unit	2.992.999.517	16 unit	8.187.461.489		
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	90,25%					90,5%	6.017.231.584		90,75%	6.618.954.742	91%	7.280.850.217	91%	19.917.036.543	Bidang PPT	
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana/prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 set					1 set	572.988.994		1 set	630.287.893	1 set	693.316.683	3 set	1.896.593.570	Seksi KKT	
		2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Uji petik kendaraan bermotor	6 kali					6 kali	86.648.905		6 kali	95.313.796	6 kali	104.845.175	18 kali	286.807.876	Seksi KKT	
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tesedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 set					1 set	3.747.340.200		1 set	4.122.074.220	1 set	4.534.281.642	3 set	12.403.696.062	Seksi KKT	
		2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi/Edukasi SOP dan Kebijakan Bidang Perhubungan	6 kali					6 kali	894.632.483		6 kali	984.095.731	6 kali	1.082.505.304	18 kali	2.961.233.519	Seksi Bina Transprtasi	
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 set					2 set	715.621.002		2 set	787.183.102	2 set	865.901.412	6 set	2.368.705.517	Seksi KKT	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan pelaksanaan pengaturan lalu lintas	12 laporan					12 laporan	11.136.923.000		12 laporan	13.750.615.300	12 laporan	15.125.676.830	36 laporan	40.013.215.130	Bidang PdKT dan Bidang MTP	
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	N/A								4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Transportasi	
		2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan					12 laporan	10.255.064.000		12 laporan	11.280.570.400	12 laporan	12.408.627.440	36 laporan	33.944.261.840	Seksi Pengaturan Transportasi	
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD/CFN	4 laporan					4 laporan	881.859.000		4 laporan	970.044.900	4 laporan	1.067.049.390	12 laporan	2.918.953.290	Seksi Pengamanan dan Pengawasan Transportasi	
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten / Kota	Laporan pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan unntuk jalan kota	N/A								4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Transportasi	

		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Forum LLAJ kota	4 laporan					4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Seksi Manajemen Angkutan
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan persetujuan hasil Andalalin	n/a					4 laporan	500.000.000	4 laporan	550.000.000	8 laporan	1.050.000.000	Bidang MTP
		2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	n/a					4 laporan	250.000.000	4 laporan	275.000.000	8 laporan	525.000.000	Seksi Manajemen Transportasi
		2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	n/a					4 laporan	250.000.000	4 laporan	275.000.000	8 laporan	525.000.000	Seksi Manajemen Transportasi
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	12 laporan			12 laporan	2.488.777.335	12 laporan	2.737.655.069	12 laporan	3.011.420.575	36 laporan	8.237.852.979	Bidang PdKT
		2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah kampanye pubik	4 kali			4 kali	318.097.400	4 kali	349.907.140	4 kali	384.897.854	12 kali	1.052.902.394	Seksi Ketertiban Transportasi
		2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan penertiban angkutan di jalan raya	12 laporan			12 laporan	2.170.679.935	12 laporan	2.387.747.929	12 laporan	2.626.522.721	36 laporan	7.184.950.585	Seksi Ketertiban Transportasi
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,05			83	24.296.622.357	83	27.226.284.593	83	29.948.913.052	83	81.471.820.002	Ka UPT Angkutan
		2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya angkutan umum massal	9 koridor			9 Koridor	24.296.622.357	9 Koridor	26.726.284.593	9 Koridor	29.398.913.052	9 Koridor	80.421.820.002	Kasubag TU Angkutan, Kasie Sarana Angkutan
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) kabupaten / kota	Koordinasi angkutan lebaran, natal dan tahun baru	3 event			3 event	500.000.000	3 event	550.000.000	3 event	550.000.000	3 event	1.050.000.000	Kasie Manajemen Angkutan
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETA APIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a					1 dokumen	2.000.000.000	1 dokumen	2.200.000.000	2 dokumen	4.200.000.000	PPT
		2.15.05.2.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a					1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	2	4.200.000.000	PPT
		2.15.05.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perkeretaapian Dalam Kota	n/a					1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	2	4.200.000.000	Seksi Perencanaan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98			82	95.802.521.959	83,50	103.427.150.032	85	111.086.459.707	85	310.316.131.699	SEKRETARIAT
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98			82	95.802.521.959	83,50	103.427.150.032	85	111.086.459.707	85	310.316.131.699	SEKRETARIAT
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%			100%	95.802.521.959	100%	103.427.150.032	100%	111.086.459.707	100%	310.316.131.699	SEKRETARIAT
		2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja PD	5 dokumen			0	5 dokumen	600.000.000	5 dokumen	660.000.000	15 dokumen	1.260.000.000	SEKRETARIAT	
		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja	5 dokumen			0	5 dokumen	600.000.000	5 dokumen	660.000.000	15 dokumen	1.260.000.000	Subag Program	
		2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	12 laporan			12 laporan	51.112.482.449	12 laporan	53.668.106.571	12 laporan	56.351.511.900	36 laporan	161.132.100.920	Sekretariat
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 laporan			12 laporan	51.112.482.449	12 laporan	53.668.106.571	12 laporan	56.351.511.900	36 laporan	161.132.100.920	Subag Keuangan
		2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawain Perangkat Daerah	100%			100%	936.692.200	100%	1.030.361.420	100%	1.133.397.562	100%	3.100.451.182	Sekretariat
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya PDH berikut atributnya	322 stel			322 stel	440.572.000	322 stel	484.629.200	322 stel	533.092.120	966 stel	1.458.293.320	Subag Umpeg
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdidiknya ASN Dishub	2 orang			2 orang	496.120.200	2 orang	545.732.220	2 orang	600.305.442	6 orang	1.642.157.862	Subag Umpeg
		2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%			100%	2.727.193.230	100%	2.999.912.553	100%	3.299.903.808	100%	9.027.009.591	Sekretaris
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 set			2 set	185.038.970	2 set	203.542.867	2 set	223.897.154	6 set	612.478.991	Subag Umpeg
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 set			10 set	839.988.470	10 set	923.987.317	10 set	1.016.386.049	30 set	2.780.361.836	Subag Umpeg

		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	12 laporan				12 laporan	729.562.150	12 laporan	802.518.365	12 laporan	882.770.202	36 laporan	2.414.850.717	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 laporan				12 laporan	443.838.040	12 laporan	488.221.844	12 laporan	537.044.028	36 laporan	1.469.103.912	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	12 laporan				12 laporan	123.096.000	12 laporan	135.405.600	12 laporan	148.946.160	36 laporan	407.447.760	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan perjalanan dinas	12 laporan				12 laporan	405.669.600	12 laporan	446.236.560	12 laporan	490.860.216	36 laporan	1.342.766.376	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%				100%	110.786.000	100%	121.864.600	100%	134.051.060	100%	366.701.660	Sekretaris	
		2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas / operasional	2 unit				2 unit	34.248.000	2 unit	37.672.800	2 unit	41.440.080	6 unit	113.360.880	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	2 set				2 set	76.538.000	2 set	84.191.800	2 set	92.610.980	6 set	253.340.780	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%				100%	4.558.023.700	100%	5.013.826.070	100%	5.515.208.677	100%	15.087.058.447	Sekretaris	
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan				12 laporan	118.946.400	12 laporan	130.841.040	12 laporan	143.925.144	36 laporan	393.712.584	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan				12 laporan	2.223.204.300	12 laporan	2.445.524.730	12 laporan	2.690.077.203	36 laporan	7.358.806.233	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan				12 laporan	2.215.873.000	12 laporan	2.437.460.300	12 laporan	2.681.206.330	36 laporan	7.334.539.630	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%				100%	5.282.797.260	100%	5.811.076.986	100%	6.392.184.685	100%	17.486.058.931	Sekretaris	
		2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	4 laporan				4 laporan	3.915.355.720	4 laporan	4.306.891.292	4 laporan	4.737.580.421	12 laporan	12.959.827.433	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit				3 unit	1.063.363.540	3 unit	1.169.699.894	3 unit	1.286.669.883	3 unit	3.519.733.317	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan sarpras kantor	4 laporan				4 laporan	304.078.000	4 laporan	334.485.800	4 laporan	367.934.380	12 laporan	1.006.498.180	Subag Umpeg	
		2.15.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	IKM	73,71				82	31.074.547.120	83,5	34.182.001.832	85	37.600.202.015	85	102.856.750.967	BLUD	
		2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Aneketan)	IKM	80,05				82	24.738.480.000	83,5	27.212.328.000	85	29.933.560.800	85	81.884.368.800	BLUD angkutan	
		2.15.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Parkir)	IKM	67,38				82	6.336.067.120	83,5	6.969.673.832	85	7.666.641.215	85	20.972.382.167	BLUD Parkir	

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase tingkat pelayanan jalan	75,65%			79,13%	85,22%	92,17%	92,17%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,98			82,00	83,50	85,00	85

Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bandung
Kota Bandung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				70	72	74	76	78	82,02	91,85				1,172	1,276			
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani				5	5	5	5	5	5	5				1,000	1,000			
3	Rasio Pengguna kendaraan umum vs kendaraan pribadi				20;80	20,25 : 79,75	20,50 : 79,50	20,75 : 79,25	21:79	20,14 : 79,86	18,25 : 81,75				1,0125	0,90			
					4,00	3,94	3,88	3,82	3,76	3,97	4,48				1,01	0,90			
4	Persentase Sarana prasarana transportasi yang tersedia				20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	25,18	43,7				1,259	1,0925			
5	Cakupan mobilitas penduduk kota dan keselamatan angkutan				20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	24,01	41,59				1,2005	1,03975			